



Pemeriksaan Kesehatan Gratis Butuh Perbaikan

► Ada puskesmas yang secara khusus menyediakan layanan PKG yang terpisah dengan layanan pasien lain.

► Dinkes akan menggandeng organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia hingga Ikatan Dokter Indonesia.

SLEMAN—Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mulai digelar serentak pada Senin (10/2) hari ini masih membutuhkan banyak peningkatan sarana.

Andreas Yuda Pramono, Aifi Annisa Karin, & Jumali
redaksi@harianjogja.com

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman telah menggelar program PKG di tiap puskesmas sejak Senin (3/2). Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sleman, Esti Kurniasih, menjelaskan ada puskesmas yang secara khusus menyediakan layanan PKG yang terpisah dengan layanan pasien lain. Ada juga puskesmas yang memberikan layanan PKG HUT menjadi satu dengan layanan pasien rutin.

"Memang ada yang menjadikan satu layanan rutin dengan layanan PKG HUT. Soalnya sumber daya manusia tiap puskesmas berbeda-beda, menyesuaikan saja," kata Esti dihubungi, Minggu (9/2).

Esti mengaku ada beberapa kendala dalam pelaksanaan PKG HUT, seperti masyarakat yang datang ke puskesmas belum terdaftar dan terverifikasi di aplikasi *Satu Sehat Mobile* (SSM) Kementerian Kesehatan. Warga yang datang, rata-rata masih berpatokan pada pendaftaran manual. Mereka datang hanya membawa KTP.

Padahal, pelaksanaan PKG HUT dilakukan pertama-tama dengan mengisi formulir skrining kesehatan di aplikasi SSM. Lebih lanjut, Esti menjelaskan ada fitur di aplikasi SSM yang baru bisa muncul atau aktif pada pekan kedua Februari 2025. Fitur yang baru muncul pada pekan kedua ini menimbulkan kendala lain, yaitu memperpanjang waktu layanan PKG HUT bagi warga, karena warga yang bersangkutan harus melakukan skrining dahulu di Puskesmas. "Kami berharap masyarakat secara aktif *men-download* aplikasi *Satu Sehat Mobile* dan mengisi kuesioner yang ada di dalamnya," katanya.

Esti mengaku partisipasi masyarakat dalam mengikuti PKG HUT masih rendah. Menurut pantauan Dinkes Sleman, ada puskesmas yang dalam sepekan belum menerima warga yang mengakses PKG. "Tapi program ini berkontribusi meningkatkan kunjungan ke puskesmas untuk upaya promotif dan preventif. Kunjungan belum merata pada semua puskesmas karena sistem notifikasi PKG HUT pada aplikasi SSM real Februari belum muncul. Namun puskesmas sudah siap untuk memberikan layanan PKG HUT sesuai kemampuan," ucapnya.

Salah satu dokter gigi di Puskesmas Gedongtengen, Kota Jogja, Annisa Nuraini, menjelaskan ada belasan jenis skrining kesehatan. Meliputi kesehatan umum, kesehatan gigi, hingga pemeriksaan laboratorium. Mengingat banyaknya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, dimungkinkan seluruhnya tak bisa selesai dalam satu hari.

"Skriningnya akan banyak, tidak selesai dalam satu hari. Dibutuhkan waktu beberapa hari," ujar Annisa, Sabtu (8/2).

Terkait dengan layanan dan sumber daya manusia, Annisa mengatakan program ini akan disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Misalnya, skrining kanker yang tak bisa dilakukan

di semua puskesmas. Dinkes yang akan memetakan lokasi pemeriksaan selanjutnya. Annisa menuturkan dalam satu hari puskesmas melayani 10 PKG.

"Kami ada pelayanan yang lain di dalam gedung dan luar gedung. Jadi biar semuanya *ter-handle* dengan baik maksimal 10 orang," ujarnya.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Jogja Waryono mengatakan jawatannya akan menggandeng organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Selain itu, Dinkes Jogja juga akan menggandeng perguruan tinggi yang memiliki prodi ilmu kesehatan seperti Poltekkes Yogyakarta. "Ada juga yang dari institusi pendidikan seperti Poltekkes," ujarnya.